

# LAMPAU DAN DATANG

Mohammad Hatta\*)

*Izinkanlah penulis terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Senat Universitas Gadjah Mada atas kehormatan yang dilimpahkan kepada penulis pada hari ini, dengan mengangkat penulis menjadi doctor honoris causa. Sungguh, penghargaan ini penulis hargai setinggi-tingginya.*

*Putusan Senat Universitas Gadjah Mada itu, mau tak mau, membayangkan, di muka penulis masa yang lampau yang jauh silam, yang penuh dengan cita-cita, — cita-cita yang dijadikan paduan bagi masa datang. Bukankah di dalam masa penjajahan, di dalam suasana Hindia Belanda, lahir ide, ciptaan yang murni dan muluk tentang bangun Indonesia Merdeka di kemudian hari?*

Ideal dan realitas, dalam perkembangannya sangat bersangkut-paut, maupun dalam perkembangan yang sejalan maupun dalam hubungan keadaan dan reaksi. Realitas yang dihadapi, — apalagi kalau pahit sekali rasanya — seringkali menimbulkan dalam kalbu suatu ideal sebagai pengobat jiwa yang luka. Ideal, yang memberikan harapan bagi masa datang dan menjadi pendorong dalam perjuangan untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai pengganti Hindia Belanda yang penuh dengan kesengsaraan dan kezaliman, diucapkan dan dijanjikan kepada diri sendiri suatu Indonesia Merdeka, yang berdasar-

kan keadilan dan kemakmuran, bebas dari kesengsaraan hidup.

Inilah yang tumbuh berangsur-angsur di dalam jiwa kaum muda Indonesia, sejak ia memperoleh keinsyafan tentang kewajibannya sebagai putera bangsa.

Indonesia di masa itu dapat dilukiskan, dalam garis besarnya, sebagai berikut.

Ditilik dari jurusan struktur sosialnya, terdapat di dalamnya dua macam dasar hidup yang bertentangan: kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme dasar pergaulan hidup Indonesia lama dan individualisme semangat masyarakat Indonesia. Berlainan dari perkembangan

\*) Proklamator, Mantan Wakil Presiden RI.

Tulisan ini diambil dari pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada tanggal 27 November 1956

masyarakat di benua Barat, di sini bangunan feodalisme tidak digantikan oleh organisasi kapitalisme, melainkan didudukinya oleh organisasi kapitalisme, melainkan didudukinya dari atas. Setia kepada prinsip rasionalis, yang menjadi motor dan dasar perhitungannya, kapitalisme yang datang ke Indonesia sebagai penyerang, perampas dan penguasa politik, tidak menghancurkan organisasi feodal yang ada, melainkan mempergunakannya sebagai alat untuk menguasai tenaga produksi masyarakat seluruhnya.

Ditinjau dari segi ekonominya, perekonomian Indonesia merupakan berbagai macam campuran antara kolektivisme dan individualisme. Di atas perekonomian rakyat, yang sebagian besar masih berdasarkan gotong-royong, tumbuh perekonomian kapitalis dengan segala tingkat perkembangannya. Di tengah-tengah perekonomian yang bersemangat *Idee der Nahrung* - cita-cita keperluan hidup sahaja - terpancang bangunan-bangunan perekonomian yang dikemukakan oleh prinsip keuntungan, oleh nafsu untuk memperbesar harta senantiasa. Apabila kita pasangkan ke situ teori - tingkatan Bruno Hildebrand tentang perkembangan perekonomian masyarakat berturut-turut di dalam waktu, yaitu *Natural-*

*wirtschaft, Geldwirtschaft* dan *Kreditwirtschaft*, ketiga tingkat itu sekali didapati di Indonesia dalam keadaan bertumpuk. Perkembangan perekonomian, yang di Barat terentang linier dalam waktu, di sini berlapis vertikal, sehingga tingkat ketiga yang lebih kuat mengimpit yang lemah dan menindas kemajuannya. Selain dari itu, perpisahan tingkat itu sebagian besar sejalan pula dengan perbedaan jenis bangsa.

Pada tingkat perekonomian natura dan separoh natura, yang sudah tipis lapisnya, duduk semata-mata suku-suku bangsa Indonesia. Di situ berlaku dasar gotong-royong dalam keadaannya yang masih murni, terdapat sistem kerjasama dalam bentuk koperasi sosial. Tingkat perekonomian uang, yang telah meluas sampai ke desa-desa, sebagian besar ditempati oleh bangsa Indonesia, selebihnya pada lapisan atasnya oleh bangsa Tionghoa. Tingkat perekonomian kredit, yang menguasai seluruhnya ke bawah rata-rata diduduki oleh bangsa kulit putih. Bangsa Tionghoa yang duduk pada tingkat kedua dijadikannya alat untuk memperhubungkannya ke bawah, ke dalam masyarakat Indonesia.

Di mata perekonomian kapitalis yang dapat menyerbu, Indonesia merupakan suatu perke-

bunan besar. Eksploitasinya didasarkan kepada dua faktor yang menguntungkan, yaitu tanah yang subur dan upah buruh yang murah. Dua faktor yang memperbesar tenaga konkurensi! Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan di dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia yang menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai daerah penjualan barang-barang industri Nederland, Indonesia belum begitu berharga. Fungsi ekonominya yang terutama ialah sebagai daerah produksi semata-mata. Karena itu *export-economie* menjadi corak perekonomian Hindia Belanda.

Ditilik dari jurusan struktur politiknya, Hindia Belanda merupakan suatu *Politie-Staat*, suatu bentuk organisasi negara yang sesuai dengan cita-cita si penjajah untuk menguasai seluruhnya, politik, ekonomi dan sosial. Di situ tidak ada tempat bagi demokrasi. Semuanya tersusun di dalam sistem hierarchi: *pangreh pradja*, polisi, tentara. Di dalam sistem itu ditempatkan, sebagai kakinya, organisasi yang rasional dari apa yang disebut *Inlands Bestuur* yang berpucuk pada Bupati. Di atas pundak bupati itu tersusun suatu sistem *Europees Bestuur* yang kokoh, yang menyusun perintah yang akan disampaikan ke bawah dan

mengadakan pengawasan atas pegawai-pegawai pemerintah bumiputera. Yang terutama dihargai bukan pegawai bumiputera yang cakap dan bercita-cita, melainkan mereka yang paling pandai menjalankan perintah.

Karena itulah maka masyarakat Indonesia, yang tertekan dan tertindas di bawah, tidak bisa berkembang dan bertunas. Semakin dalam kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak kehidupan rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi. Sendi-sendi masyarakat hancur karena tiga macam sistem penghisapan yang dilakukan berturut-turut selama tiga abad, yaitu sistem OIC, *cultuurstelsel* dan sistem inisiatif partikular. Dan dalam segala pemerasan itu, pemerintah jajahan di mana perlu bersikap – menurut kata JE Stokvis – *als de natuurlijke hoeder van het koloniale kapitalisme*.

Dengarlah pula betapa tepatnya Prof. J.H. Boeke menggambarkan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme kolonial itu di Indonesia:

“Asas-asas liberal yang menempatkan orang-seorang di muka sebagai sendi perusahaan dan serangan kapitalisme, telah merobohkan di Indonesia – lebih lagi dari Eropa – sendi-sendi persekutuan hidup dan menghalau kaum yang lemah menyebarkan

diri ke dalam perjuangan sosial yang begitu sedih. Kita semuanya tahu, bahwa kapitalisme yang berusia penuh ini masuk ke Indonesia sebagai perampas dan menaklukkannya dalam beberapa puluh tahun saja. Lebih ganas lagi dari Eropa tampak di tanah jajahan bekas politik, yang berpedoman kepada keperluan mereka yang mempunyai alat yang cukup, pengetahuan tinggi dan senantiasa siap untuk berjuang. Politik perekonomian yang membuka pintu Indonesia untuk kapitalis yang keras hati, politik perhubungan yang mendekatkan segala yang jauh dan merombak pagar perasingan, asas kemerdekaan berdagang yang membukakan pintu kepada lawan bersaing dari luar, kemerdekaan pasar yang mempertajam persaingan perniagaan dalam negeri, aturan bayar pajak yang semakin lama semakin dilakukan dengan uang dan mengenai diri seseorang, undang-undang dan pengadilan cara barat, politik, pendidikan, — semuanya itu merombak susunan pergaulan hidup anak negeri serta organisme sosial yang ada, sehingga orang banyak yang bertenaga lemah tidak sanggup bertahan. Persekutuan sosial yang ada diruntuhkan

dengan tidak diganti dengan yang baru, dihancurkan dengan tidak didirikan tukarannya, kemelaratan ditimbulkan dengan tidak membangkitkan tenaga yang baru, dan karena itu hasilnya membinasakan semangat manusia".<sup>1</sup>

Ini bukan ucapan seorang revolusioner Indonesia, melainkan hasil analisa ilmiah dari seorang ekonom kolonial yang dalam perasaan kemanusiaannya.

Pengetahuan ini beserta penghidupan rasial dan individual yang dialami sehari-hari memberikan isi kepada cita-cita Indonesia Merdeka di kemudian hari. Dan pengetahuan tentang cita-cita kolonial Belanda, yang tidak memberikan tempat sedikit pun kepada tujuan Indonesia berpeperintahan sendiri, memperkuat semangat kebangsaan. Indonesia Merdeka, bersatu dan tidak terpisah-pisah serta berjuang atas kekuatan tenaga sendiri — menjadi semboyan pergerakan nasional. Ucapan pemimpin-pemimpin Belanda, seperti H. Colijn, yang mengatakan bahwa kepada kaum pergerakan Indonesia harus ditegaskan bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia kuat duduknya seperti *Mont-Blanc* di atas Alpen<sup>2</sup>, hanya dapat membakar semangat ke-

1 JH Boeke, *Auto-activiteit naast autonomie*, pag. 53 d.s.

2 H. Colijn, *Koloniale vraagstukken van heden en morgen*, 1928, hal. 39.

bangsaan Indonesia yang sudah berkobar.

Menundukkannya tak mungkin lagi! Demikianlah lahir dalam pangkuan pergerakan kemerdekaan dahulu empat dari sila yang lima.

Yang menjadi sendi negara sekarang: perikemanusiaan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Semuanya itu cita-cita buat masa datang sebagai reaksi kepada realitas yang pahit: kesengsaraan rakyat, penghinaan bangsa, pemerasan dan penderitaan nasional, di bawah suatu kekuasaan autokrasi kolonial.

Indonesia Merdeka di masa datang mestilah negara nasional, bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam rupa apa pun juga, politik maupun ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksana dalam segala segi penghidupan, dalam perhubungan antara seorang dengan seorang, antara majikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perjuangan menentang penjajahan, cita-cita perkemanusiaan tidak saja bersifat antikolonial dan antiimperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusia dari segala tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Literatur sosialis yang banyak dibaca dan pergerakan kaum buruh

Barat yang dilihat dari jauh dan dari dekat, memperkuat cita-cita itu menjadi keyakinan.

Perasaan itu, yang begitu meresap di dalam jiwa pergerakan nasional, dinyatakan kemudian sebagai pendirian pokok di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Apabila *Universal Declaration of Human Rights* yang 30 pasal, yang diterima sebagai usul di dalam sidang PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, memuat dalam pasal 1, bahwa *all human beings are born free and equal in dignity and rights*, maka pernyataan ini terdengar oleh penganjur-penganjur Indonesia yang berjuang dahulu sebagai pemuda dan perintis, sebagai suaranya sendiri. Mereka merasa, seolah-olah orang mau merealisasi cita-cita mereka yang lama itu di dalam pergaulan hidup internasional. Apabila cita-cita itu sudah dipandang patut dilaksanakan dalam hubungan internasional, apakah ia akan ditinggalkan di dalam hubungan nasional?

Suatu masalah yang prinsipil lagi harus dipecah! Apabila

Indonesia sampai merdeka, bagaimanakah mestinya bentuk negaranya? Pengalaman dengan pemerintah autokrasi kolonial dalam bentuk negara-kepolisian menghidupkan di dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk republik, berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi apriori sudah ditolak.

Dalam mempelajari Revolusi Perancis 1789, yang terkenal sebagai sumber demokrasi Barat, ternyata bahwa trilogi, kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi semboyannya tidak terlaksana di dalam praktik<sup>3</sup>. Itu tidak mengheran-

kan, karena Revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individu untuk memerdekakan orang seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perancis tujuannya hendak melaksanakan cita-cita sama rata sama rasa – sebab itu di sebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan –, demokrasi yang dipraktikkan hanya membawa persamaan politik.

Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lain; kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak-sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme, yang dihidupkan oleh Revolusi Perancis, kapitalisme subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah hebat, penindasan yang lemah ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam. Di mana ada pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, di mana ada golongan yang menindis dan tertindis, di situ sukar didapat per-

3 Lihat umpamanya, karangan penulis "Revolusi Perancis" dalam Kumpulan Karangan penulis, jilid IV, hal. 11 d.s.

Indonesia sampai merdeka, bagaimanakah mestinya bentuk negaranya? Pengalaman dengan pemerintah autokrasi kolonial dalam bentuk negara-kepolisian menghidupkan di dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk republik, berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau, yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi apriori sudah ditolak.

Dalam mempelajari Revolusi Perancis 1789, yang terkenal sebagai sumber demokrasi Barat, ternyata bahwa trilogi, kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi semboyannya tidak terlaksana di dalam praktik<sup>3</sup>. Itu tidak mengheran-

kan, karena Revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individu untuk memerdekakan orang seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinya orang lupa akan rangkaianannya dengan persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perancis tujuannya hendak melaksanakan cita-cita sama rata sama rasa – sebab itu di sebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan –, demokrasi yang dipraktikkan hanya membawa persamaan politik.

Dalam politik hak seseorang sama dengan yang lain; kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak-sama. Malahan dengan berkobarnya semangat individualisme, yang dihidupkan oleh Revolusi Perancis, kapitalisme subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah hebat, penindasan yang lemah ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam. Di mana ada pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan, di mana ada golongan yang menindis dan tertindis, di situ sukar didapat per-

3 Lihat umpamanya, karangan penulis "Revolusi Perancis" dalam Kumpulan Karangan penulis, jilid IV, hal. 11 d.s.

saudaraan. Stelsel bertanggung jawab sendiri di dalam ekonomi membawa akibat, bahwa hidup seorang buruh hanya terjamin selama ia kuat dan dapat bekerja. Ia terlempar dan terlantar, apabila ia sudah tua dan sakit-sakit dan tenaganya bekerja sudah lemah.

Nyatalah, bahwa demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar perike-manusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktek hidup nasional di kemudian hari.

Jika ditilik benar-benar, ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia di waktu itu. Pertama, paham sosialisme Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanu-

siaan yang di belanja dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Illahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanya itu hanya memperkuat keyakinan, bahwa bangun demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintahan Indonesia Merdeka di kemudian hari haruslah suatu perkembangan dari demokrasi asli, yang berlaku di dalam desa Indonesia.

Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal, yang dikuasai oleh raja autokrat. Sungguhpun begitu di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti ini menanam keyakinan, bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya, tidak *lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan*.

Inilah pula dasarnya, apa sebab demokrasi asli itu begitu diidealisir di dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Banyak pemimpin yang menganggapnya sudah cukup lengkap untuk dijadikan dasar pemerintahan negara modern. Angkatan feodalisme dan kapitalisme yang menindisnya -- demikian kata

mereka —, ia akan kembang ke atas dan hidup dengan suburnya di atas rumpun yang sehat.

Analisa sosial menunjukkan, bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan di bawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa. Bukan kepunyaan raja. Dan sejarah sosial di benua Barat memperlihatkan, bahwa pada zaman feodalisme milik tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya. Ia terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain; ia menjadi budak pekarangan tuan tanah. Siapa yang memiliki tanah yang luas, ia mempunyai kekuasaan, dan besar kekuasaan itu sepadan dengan luas tanah yang dimiliki.

Oleh karena dalam Indonesia dahulu-kala milik tanah adalah pada masyarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditindis hidupnya oleh kekuasaan feodal yang meliputinya dari atas, tetapi tidak dapat dilenyapkan. Berdasarkan milik bersama atas tanah, maka tiap-tiap orang seorang dalam mempergunakan tenaga ekonominya merasa perlu akan persetujuan kaumnya. Kelanjutan dari itu didapati pula, bahwa segala usaha yang berat, yang tidak terkerjakan oleh te-

naga orang seorang, dikerjakan bersama secara gotong royong. Bukan saja hal-hal yang menurut sistem juridis Barat termasuk ke dalam golongan hukum publik dikerjakan begitu, tetapi juga yang mengenai hal-hal prive, seperti mendirikan rumah, mengerjakan sawah, mengantar mayat ke kubur dan lain-lainnya. Adat hidup semacam itu, yang berdasarkan hak milik bersama tadi atas tanah, membawa kebiasaan bermusyawarat. Segala keputusan tentang soal-soal yang mengenai kepentingan umum diambil dengan kata sepakat. Seperti disebut di dalam pepatah Minangkabau: *Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat*. Kebiasaan menetapkan keputusan dengan mufakat menimbulkan kebiasaan mengadakan rapat pada tempat yang tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Segala orang dewasa anggota asli desa berhak hadir dalam rapat itu.

Dengan itu belumlah lengkap disebut anasir-anasir demokrasi dalam desa Indonesia yang asli. Ada dua lagi, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama atas peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah di bawah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Benar atau tidak, yang kemudian ini

sering dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Seperti diketahui, hak mengadakan protes bersama biasa dilakukan sampai pada masa yang akhir ini. Apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang diadakan oleh Bupati atau Wedana atau pembesar lainnya, maka kelihatan orang datang sekali banyak ke alun-alun dan duduk di sana beberapa lama dengan tiada berbuat apa-apa. Tidak sering rakyat Indonesia dahulu, yang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, maka itu menjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mencabut kembali atau mengubah perintahnya.

Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, tolong menolong atau gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan raja, dipuja di dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka di masa datang.

Analisa yang dikerjakan kemudian dengan tenang, bebas dari keinginan meidealisir segala yang asli dari kita, menunjukkan bahwa tidak semuanya mana yang tampak bagus pada

demokrasi desa dapat dipakai begitu saja pada tingkat negara. Mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar. Sebelum terdapat kata sepakat belum dapat diambil keputusan, dan halnya terus dibicarakan di dalam dan di luar rapat. Keputusan dengan mufakat tidak mungkin tercapai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, di mana terdapat berbagai partai dan pertentangan politik. Dalam hal ini, mau tak mau, orang harus menerima sistem demokrasi Barat, yaitu mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Sebaliknya, mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai hasil dari permusyawaratan. Dengan tidak ada musyawarat, di mana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat. Tetapi di dalam masyarakat kolektif yang demokratis, seperti di Indonesia, mentalitas orang seorang berlainan dari di dalam masyarakat individualis. Dalam segala tindakannya dan menyatakan pendapatnya, ia terutama dikemukakan oleh

kepentingan umum. Dalam keselamatan kesemuanya terletak kepentingan sendiri. Sebab itu, pada dasarnya, mencapai kata sepakat lebih mudah. Sungguhpun orang seorang dalam pikirannya dan dalam tindakannya keluar terikat kepada cita-cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-mata dari kolektivitas, seperti yang berlaku dalam negara totaliter. Ia tetap subyek yang mempunyai kemauan, merdeka bergerak untuk mengadakan perhubungan yang spesial, untuk mengadakan diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat ia tetap mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran untuk mencapai keselamatannya atau keselamatan umum.

Inilah tipe manusia Indonesia yang tergambar di dalam kalbu waktu berusaha menciptakan suatu sistem demokrasi yang tepat bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Betapa pun juga, orang tak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial, yang banyak sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarat, berdasarkan kepentingan umum. Otonomi yang luas sebagai cermin dari pemerintahan dari yang diperintah harus terlaksana. Dalam segi ekonomi dilaksanakan koopera-

si sebagai dasar perekonomian rakyat, ditambah dengan kewajiban Pemerintah untuk menguasai atau mengawasi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan keperibadian manusia. Manusia bahagia, sejahtera dan susila menjadi tujuan negara.

Demikianlah tumbuh berangsur-angsur di dalam pangkuan pergerakan kebangsaan cita-cita yang memberi semangat kepada perjuangan kemerdekaan dan menjadi dasar bagi pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Tatkala bermusyawarat tentang masalah apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia di dalam Panitia Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada permulaan bulan Juni 1945, rata-rata orang menganggap perlu, bahwa Republik Indonesia akan dibangun tidak saja berdasarkan politik sosial, tetapi juga mempunyai dukungan moril dari agama. Dalam suasana politik di waktu itu, seperti juga dinyatakan di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar, orang merasa bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas kurnia Allah. Dengan berkat dan rahmat Tuhan — demikian tertulis di

situ - tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Pemimpin dari segala golongan mempunyai keinginan di dalam hati, supaya di dalam Indonesia Merdeka tidak saja berlaku kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing, tetapi juga perdamaian agama. Maka, atas anjuran Bung Karno<sup>4</sup> yang merumuskan Pancasila, diterimalah, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar kelima. Dengan itu ideologi negara tersusun atas dua lapis fondamen: fondamen politik dan fondamen moral.

Sejak dirumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 untuk dijadikan teks Proklamasi<sup>5</sup> Indonesia Merdeka,

Oleh sembilan orang pemimpin yang meliputi berbagai golongan dan aliran agama, urutan kelima dasar itu sudah berubah. Dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa, yang mulanya jadi dasar penutup, sekarang terletak di atas sebagai sila pertama. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang lebih kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam.

Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya - seperti dikehendaki di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar pertama - suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar perikemanusiaan adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktek hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar kebangsaan menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri, sedangkan dasar karakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.

Akibat dari perubahan urutan sila yang lima itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Ketuhanan Yang

4 Lihat Ir. Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, cetakan ketiga, 1949. Perhatikan pula H. Rosin, *Pancasila*.

5 Teks Piagam Jakarta itu dimuat di dalam buku Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, 1951. 17.

Maha-Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing – seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula – melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara pada hekekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Bukankah ditegaskan di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna? Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasas senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali kejadian yang benar.

Di atas dasar Pancasila sebagai ideologi negara direncanakan Undang-Undang Dasar

yang akan menjadi sendi politik negara dan politik Pemerintah, yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan.

Di sini bukan tempatnya untuk meninjau perkembangan Undang-Undang Dasar kita dari tahun 1945 sampai sekarang. Cukuplah apabila penulis kemukakan, bahwa Undang-Undang Dasar kita memuat pokok-pokok bagi perkembangan demokrasi politik (pasal 1, 35, 131), demokrasi ekonomi (pasal 38, 37) dan demokrasi sosial (pasal 36, 39, 41, 42) beserta hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

Dengan mengakui tentu ada kekurangannya, pada umumnya dapat dikatakan, bahwa Undang-Undang Dasar negara kita cukup modern, memuat di dalamnya cita-cita yang hidup dalam pergerakan kemerdekaan dahulu sebagai hasrat bangsa yang adab, cinta merdeka, damai, keadilan dan makmur bersama.

Tetapi hingga manakah kesanggupan kita melaksanakannya di dalam praktek?

Tidaklah terlalu jauh penulis dari kebenaran, apabila penulis katakan, bahwa kita selama terjajah banyak bercita-cita, setelah merdeka kehilangan rupa.

Seolah-olah teruntuk pula bagi bangsa kita gubahan Schiller, yang bunyinya:

*“Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren,*

*“Aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht”*

Apakah bagi bangsa kita akan terulang lagi nasib yang meliputi Revolusi Perancis 1789, yang muncul dengan semboyan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi melaksanakan di dalam praktek hidup sesudah itu kebebasan menindis, ketidak-samaan dan pertentangan serta kebebasan untuk hidup miskin dan melarat? Apa yang kita alami di Indonesia sehari-hari sekitar kita, merupakan seolah-olah Pancasila itu diamalkan di bibir saja, tidak menjadi pelita di dalam hati untuk membangun masyarakat baru. Tiap-tiap golongan berkejar-kejar mencari rejeki. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Dalam teori kita membela demokrasi sosial, dalam praktek dan perbuatan menghidupkan semangat demokrasi liberal. Partai yang pada hekatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat belajar merasai tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, — partai itu dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya. Dengan itu dilupakan, bahwa

adalah imoril dan bertentangan dengan Pancasila, istimewa dengan dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa, apabila rakyat dirugikan untuk kepentingan partai, yaitu golongan.

Juga dalam hal menempatkan pegawai pada jabatan umum di dalam dan di luar negeri seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan dasar *the right man in the right place*. Pegawai yang tidak berpartai atau partainya duduk di bangku oposisi merasa kehilangan pegangan dan menjadi patah hati. Ini merusak ketenteraman jiwa bekerja, menunda orang ke jalan curang dan korupsi mental. Aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegawai, dengan politik kepartaian itu orang menghidupkan yang sebaliknya, mengasuh orang luntur karakter. Akhirnya, orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan.

Melihat perkembangan keadaan dalam negara dan masyarakat dalam masa yang akhir ini, kita memperoleh kesan, bahwa sesudah terlaksana Indonesia Merdeka dengan korban yang tidak sedikit, pemimpin dan pejuang idealis tertunda ke belakang, O.W.-ers politik dan ekonomi serta manusia profitir maju ke muka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diper-

alatkan mereka, partai-partai politik ditungganginya, untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Maka timbullah anarkhi dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela.

Demikianlah wajah Indonesia, sekarang setelah sekian tahun merdeka. Nyatalah, bahwa bukan Indonesia Merdeka yang semacam ini, yang diciptakan oleh pejuang-pejuang dahulu.

Di mana-mana sekarang orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dicita-citakan masih jauh saja, sedangkan nilai uang semakin merosot. Demikian besarnya pertentangan antara kenyataan dan harapan, sehingga jiwa yang gusar tidak melihat lagi pembangunan-pembangunan yang benar-benar dijalankan dan memberikan hasil yang positif. Renungkanlah apa yang telah tercapai dalam lapangan pendidikan dan pengajaran dan dalam lapangan pertanian! Tetapi semuanya itu digelapkan oleh rencana-rencana yang terlantar dan karena itu sangat merugikan negara dan penghidupan rakyat. Keruntuhan dan kehancuran barang-barang kapital di mana-mana lebih mudah kelihatan, seperti hancurnya jalan-jalan raya, irigasi, pelabuhan, berkembangnya

erosi dan lain-lainnya.

Pembangunan demokrasi pun terlantar karena percekocokan politik senantiasa. Indonesia yang adil, yang ditunggu-tunggu, masih jauh saja. Pelaksanaan otonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri beserta perhubungan yang tepat dengan pemerintahan pusat sampai sekarang belum juga terjadi, sungguhpun sudah sebelas tahun tugas yang maha penting ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangga sendiri, demikianlah bunyi suruhan pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara.

Apabila akhirnya Kementerian Dalam Negeri menyiapkan rancangan Undang-Undang pemerintahan daerah, yang telah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, cita-cita otonomi selama ini tidak tergambar di dalamnya. Aturan meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten, ia dititikberatkan pada propinsi, yang diimbangi pula dengan seorang Komisaris Negara. Rencana ini lebih merupai sistem hierarkhi Hindia Belanda dahulu daripada diisi dengan semangat demokrasi Indonesia. Mau tak mau, dengan melewati undang di balik batu, konstruksi Komisaris Negara di sebelah Kepala Daerah Propinsi menimbul-

kan asosiasi dengan pasangan *Assistant - Resident - Regent* dahulu. Dalam psikologinya konstruksi ini salah. Di daerah akan dirasakan sebagai muslihat pusat untuk mengurangi otonomi daerah. Apa sebab ditinggalkan sistem yang nyata baik, bahwa Gubernur mempunyai dua macam fungsi yang merupakan *trait d'union*, sebagai Kepala Daerah dan sebagai Pegawai Pemerintah Pusat?

Apabila kita mau mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yang bertanam dalam pengertian pemerintahan dari yang diperintah, maka sebaiknya titik berat pemerintahan sendiri diletakkan pada kabupaten. Propinsi dalam sistem ini menjadi badan koordinasi dari segala kabupaten yang berada di dalam lingkungannya. Kelanjutannya ialah bahwa Propinsi tidak mempunyai Dewan Perwakilan yang langsung dipilih oleh rakyat, melainkan Dewannya itu tersusun dari wakil-wakil yang diutus oleh tiap-tiap kabupaten dengan jumlah sama banyak. Misalnya, tiap-tiap kabupaten mengutus satu atau dua orang. Dengan cara begitu maka propinsi merupakan badan pelaksana kerjasama antara kabupaten dalam segala hal yang mengenai kepentingan bersama. Memang, dengan jalan

begitu kurang kesempatan bagi beberapa ratus orang untuk menjadi anggota DPR daerah, tetapi pemerintahan lebih efektif dan demokrasi lebih demokratis dengan tidak terlalu banyak tingkat hierarkhi.

Dengan menitikberatkan otonomi pada kabupaten, maka kabupaten dapat memimpin perkembangan otonomi desa berangsur-angsur, sampai juga di desa tercapai "mengurus rumah tangga sendiri" di dalam arti yang sebenar-benarnya.

Gambaran penulis ini, yang menunjukkan pertentangan yang hebat sekali antara idealisme dahulu dan realitas sekarang, tidaklah bermaksud untuk menebarkan di sini perasaan pesimis. Penulis percaya akan kekuatan proses regenerasi yang ada di dalam masyarakat kita. Demoralisasi, yang sekarang muncul dalam segala lapangan hidup, dapat melambatkan jalan proses itu, menahan sama sekali ia tak dapat. Bangsa kita sedang menempuh cobaan untuk merdeka dan bertanggung jawab atas nasib sendiri. Kemerdekaan telah dirasakan, tetapi tanggung jawab belum diinsyafi. Dan lambat-laun akan dirasakan, bahwa tak ada kemerdekaan yang kekal dengan tak tahu membatasi diri, dengan tak ada rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang didiami.

Suatu analisa sosial yang mendalam akan menunjukkan, bahwa segala pemberontakan dan perpecahan, anarkhi politik dan avonturisme serta tindakan-tindakan ekonomi yang mengacaukan, adalah akibat dari revolusi nasional yang tidak dibendung pada waktu yang tepat. Salah benar orang yang mengatakan, bahwa revolusi nasional kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masyarakat sekunjung-kunjug, yang melaksanakan *Umwertungaller Werte*. Revolusi menggoncang lantai dan sendi, pasak dan tiang jadi longgar semuanya. Sebab itu saat revolusi tidak dapat berlaku terlalu lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil dari revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya di dalam waktu, setelah fondamen dibentangkan. Revolusi itu sendiri sebentar saatnya, masa revolusioner dalam konsolidasi dapat berjalan lama, sampai berpuluh tahun. Demikianlah dengan revolusi Perancis, demikian dengan revolusi Rusia, demikian dengan Revolusi Kemalis (Turki) dan lain-lainnya.

Tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama. Sebab, apabila tidak dibendung pada waktu yang tepat, pasak dan tiang yang jadi

longgar tadi terus berantakan dan akhirnya seluruh bangunan ikut berantakan. Sementara itu anasir-anasir baru memasukinya, mengambil keuntungan dari situ. Dan antara merdeka dan anarkhi tidak terang lagi batasnya.

Sebetulnya, revolusi nasional kita, setelah berjalan beberapa tahun, harus dibendung, dipimpin secara teratur untuk mendidik orang banyak ke jalan menginsyafi tanggung jawab di dalam demokrasi. Sebab, demokrasi tak mungkin hidup dengan tak ada rasa tanggung jawab. Jadinya, mestilah ada latihan demokrasi dahulu bagi rakyat yang belum pernah mengenal demokrasi pada tingkat negara seluruhnya.

Tetapi, dengan tidak ada latihan dan didikan tanggung jawab dahulu di bawah pimpinan Pemerintah yang mempunyai kewibawaan, kita mau lekas-lekas melaksanakan pemerintahan demokrasi parlementer. Mau menyelenggarakan demokrasi parlementer, dengan tiada demokrasi dan tidak ada Parlemen. Alhasil yang terdapat anarkhi politik, yang kita alami sejak beberapa tahun yang akhir ini. Karena itu hilang kewibawaan Pemerintah. Kekurangan kewibawaan pemerintah bertambah pula, karena praktek hidup kepartaian menetapkan suatu kebiasaan yang ganjil, bahwa kekuasaan yang sebenarnya

tidak pada pemerintah yang memerintah dengan bertanggung jawab, melainkan pada dewan partai yang tidak bertanggung jawab. Dengan praktek seperti itu, pemerintah diturunkan derajatnya jadi orang suruhan partainya. Akibat dari itu lagi ialah, bahwa pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka di dalam partai tidak duduk di dalam kabinet. Untuk menjadi anggota pemerintah ditunjuk orang yang tidak terlalu terkemuka, malahan adakalanya tokoh kelas dua atau kelas tiga, dengan tidak mempunyai pengetahuan istimewa tentang isi jabatan yang ditugaskan kepadanya. Inilah kenyataan yang kita alami sekarang, sebagai akibat dari paham yang salah tentang menafsirkan jalannya revolusi dan masa revolusioner dan akibat dari sistem kepartaian, yang menanggali pemerintah dari kekuasaan yang seharusnya di tangannya.

Enam tahun lamanya kita mempraktekkan pemerintahan demokrasi parlementer, dengan tiada demokrasi dan tidak ada parlemen. Setelah kita sekarang mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan "kemauan rakyat" dalam pemilihan yang bersifat umum, di mana jadinya ada alasan bagi pemerintahan demokrasi parlementer, mungkinkah orang akan kembali dari situ? Sukar kiranya, apabila

orang tak mau inkonsekuen.

Inilah suatu dilemma yang sangat terasa di waktu sekarang.

Apabila sekarang tiba saatnya bagi penulis untuk menyudahi tulisan ini, maka ingin penulis meminta perhatian Universitas Gadjah Mada terhadap soal-soal negara dan masyarakat yang penulis gambarkan tadi, terhadap realitas yang tidak sesuai dengan idealisme, yang tertanam dan tumbuh dalam hati yang murni. Realitas dan politik kenegaraan, yang tidak sesuai dengan ideologi negara, Pancasila, yang diakui sebagai bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat seluruhnya. Universitas Gadjah Mada, yang dibangun di dalam kancah revolusi nasional dan berdiri di tengah-tengah kota Yogyakarta yang bersejarah sebagai ibu kota berjuang, mudah-mudahan Universitas Gadjah Mada dapat memberi semangat kepada pemuda, laki-laki dan perempuan, yang belajar di sini, supaya dari pelajar-pelajar ini nanti bangsa kita memperoleh bibit dan calon pemimpin yang bercita-cita, yang dengan pengetahuan yang menjadi pembawaan dirinya dapat menyesuaikan praktek politik dan filsafat hidup sehari-hari dengan cita-cita besar yang menjadi ideologi negara.

